

**Judul** : Komisi VIII ingatkan kesiapan infrastruktur  
**Tanggal** : Jumat, 31 Juli 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Komisi VIII Ingatkan Kesiapan Infrastruktur

ANGGOTA Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendorong kesiapan validitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mitigasi risiko terkait rencana penyaluran bantuan sosial via Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hal ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyaluran bantuan.

Dia mengaku, kebijakan ini memang belum pernah dibicarakan oleh Kementerian Sosial (Kemsos) bersama DPR, sehingga pelaksanaannya masih belum pasti. Namun, pihaknya tetap menyambut baik setiap langkah Pemerintah, sembari mengingatkan sejumlah kasus terdahulu yang merugikan masyarakat dan perlu dijadikan bahan evaluasi.

"Sistem pengawasan pertanggungjawaban mesti diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran, penyimpangan, konflik kepentingan lokal, maupun berkurangnya akses masyarakat penerima manfaat bantuan," terangnya, Rabu (29/7/2026).

Selly menjelaskan, transformasi penyaluran bantuan sosial sudah berlangsung sejak era Presiden Jokowi. Tapi, niat baik itu justru sering dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab dengan manipulasi nilai ratusan juta di

kantor pos. Selain itu juga kerap terjadi penyimpangan spesifikasi paket sembako pada *e-warong* yang tidak sesuai ketentuan.

Dia mendorong penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Combo Himbara berfungsi baik agar masyarakat prasejahtera dapat mengambil bantuan di ATM mana pun secara mandiri. "Kebijakan apa pun yang nantinya diputuskan harus selalu berlandaskan perlindungan sosial masyarakat dan tepat sasaran," tegasnya.

Selanjutnya, mengingat waktu penyaluran yang direncanakan pada September 2026 nanti, Kemsos diharapkan mampu memitigasi potensi masalah lewat kajian matang. Pandangan objektif ini selaras dengan mandat Ketua DPR Puan Maharani untuk selalu mengedepankan kepentingan kelompok rentan sebagai penerima manfaat utama bansos.

Selly menegaskan, skema itu belum pernah dibahas resmi dalam rapat kerja DPR dengan Pemerintah. "DPR masih menunggu penjelasan resmi Pemerintah mengenai desain kebijakan, dasar hukum, kesiapan kelembagaan, serta mekanisme teknis implementasi di lapangan secara jelas dan menyeluruh," ucapnya.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi VIII DPR Aprozi Alam mengingatkan agar perubahan skema penyaluran bansos harus tetap berorientasi pada satu tujuan utama. Bantuan wajib diterima masyarakat yang benar-benar berhak secara mudah, cepat, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya secara transparan kepada publik.

Dibandingkan mekanisme terdahulu via bank Himbara atau PT Pos Indonesia, penyaluran lewat KDMP diharapkan menghadirkan layanan lebih dekat di pedesaan. Selain menjadi lokasi pencairan bantuan, koperasi berpotensi jadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian desa.

Transformasi skema ini, kata Aprozi, harus diiringi dengan beberapa prasyarat utama di lapangan. "Pertama, kesiapan KDMP wajib

dipastikan secara matang. Mulai dari tata kelola, kualitas SDM, ketersediaan infrastruktur digital, hingga standar sistem pelayanan langsung kepada seluruh masyarakat penerima bantuan," ingatnya.

Berikutnya, validasi DTSEN harus terus diperkuat secara berkala oleh Pemerintah. Karena perubahan mekanisme penyaluran tidak akan berjalan efektif apabila data penerima bantuan masih belum akurat. ■ PYB